

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashshofa, B., 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Jayanti, N. KI., 2009, *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, Pustaka Yustika, Yogyakarta.
- Narbuko, N., dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soemitro, R. H., 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, S., 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudjana, N., dan Ibrahim, 1989, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru, Bandung.

ARTIKEL JURNAL

- Abduh, R., “Kajian Hukum Rekam Medis sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Aliza, N. O., et.al, “Regulasi Proteksi Data Pribadi Pasien Covid-19 di Indonesia”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Amiruddin, “Pelaksanaan Supremasi Hukum dalam Rangka Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Bertanggung Jawab pada Lembaga Peradilan”, *Maleo Law Journal*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Amran, et.al., “Peran Penting Kelengkapan Rekam Medis di Rumah Sakit”, *Baiturrahmah Medical Journal*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Ardinata, M., “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 2, 2020.
- Bachtiar, R. I., dan Sumaryana, Y., “Sistem Pengolahan Rekam Medis”, *Jurnal Jumantaka*, Vol. 1., No. 1, 2018.
- Dharmawan, R. W., et.al., “Pengaruh Kemudahan dan Kemanfaatan Sistem Informasi Rekam Medis terhadap Kinerja Dokter”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 27, No. 2, 2015.

Fadhillah, S. A., 2023, *Efektivitas Rekam Medis Elektronik Instalasi Rawat Jalan di RSUD Brebes*, Skripsi, Program Studi Informatika Medis Fakultas Keperawatan, Bisnis, dan Teknologi Universitas Widya Husada, Semarang.

Hartiningsih, R. H., “Pola Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien”, *Jurnal Maksigama*, Vol. 14, No. 1, 2020.

Kurniawan, A. L., dan Setiawan, A., “Perlindungan Data Rekam Medis sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, 2021.

Nababan, S. L., et.al, “Rekam Medis Konvensional dan Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2020.

Prasasti, T. I., dan Santoso, B. D., “Keamanan dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen”, *Jurnal Kesehatan Vokasional*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Putra, D. M., dan Rahmadhani, “Tinjauan Pelaksanaan Kerahasiaan Rekam Medis di Puskesmas Kuranji Padang”, *Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda*, Vol. 6, No. 1, 2021.

ARTIKEL INTERNET

Ardiansyah, “Penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam Keperawatan”, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/507/penggunaan-rekam-medik-elektronik-dalam-keperawatan, diakses 10 Oktober 2023.

INTERNET

Media Center Sleman, “Serius Tingkatkan Jamkesmas, Pemkab Sleman Raih Penghargaan UHC”, <https://mediacenter.slemankab.go.id/2023/03/15/serius-tingkatkan-jamkesmas-pemkab-sleman-raih-penghargaan-uhc/>, diakses 10 Oktober 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 671).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter atau Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

Peraturan Walikota Bogor Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter Mandiri